

SKRIPSI

**GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI
KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)



Disusun Oleh:

**Fabianus Jawa
18520040**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

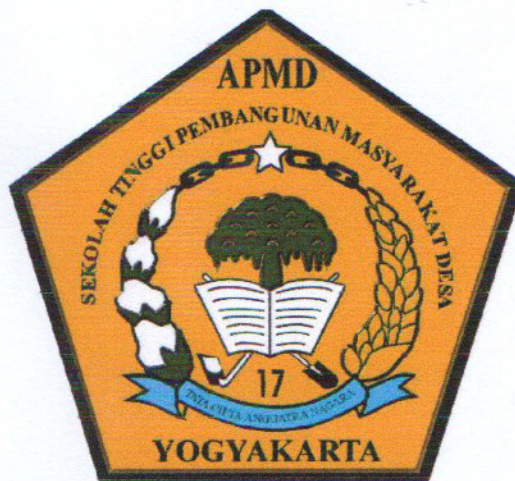
YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

**GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI
KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)



Disusun Oleh:

**Fabianus Jawa
18520040**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

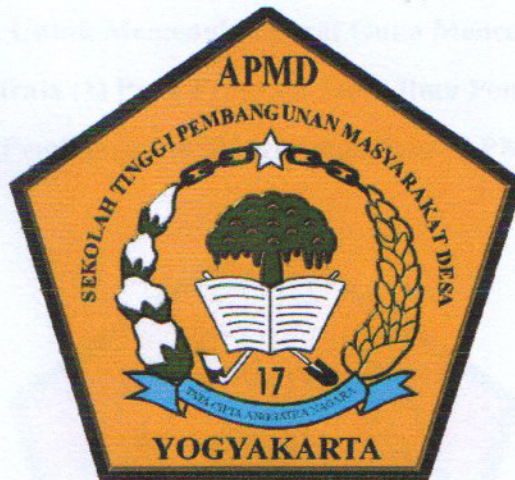
2022



SKRIPSI

**GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI
KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)



Disusun Oleh:

**Fabianus Jawa
18520040**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

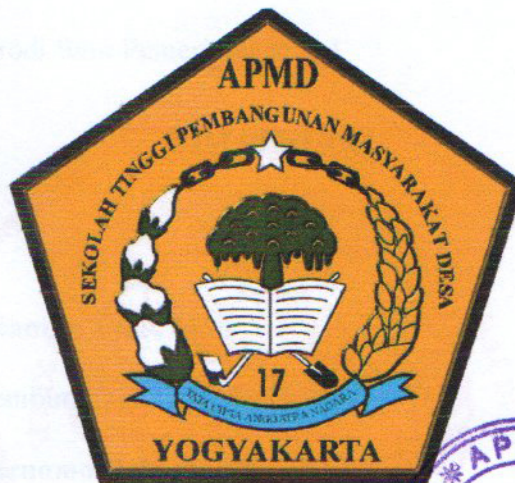
2022

**GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI
KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Fabianus Jawa
18520040

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:

Hari : Jumad

Tanggal : 01 April 2022

Jam : 13.30 WIB

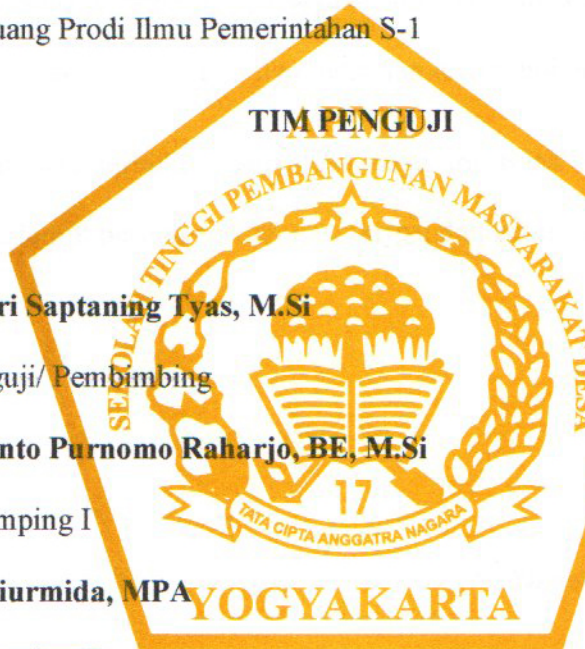
Tempat : Ruang Prodi Ilmu Pemerintahan S-1

NAMA

1. **Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Ketua Penguji/ Pembimbing
2. **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si**
Penguji Samping I
3. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA**
Penguji Samping II

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN



[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



[Handwritten signature of Dr. Guno Tri Tjahjoko]
(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fabianus Jawa

Nomor Mahasiswa : 18520040

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut ialah telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Nagekeo, 17 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



(Fabianus Jawa)

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN,
yang menaruh harapannya pada TUHAN!”

(Yeremia 17:7)

“Karena masa depan sungguh ada, dan
Harapanmu tidak akan hilang”.

(Amsal 23:18)

“Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan,
kesenangan atau kenyamanan. Tapi,
Mereka dibentuk melalui kesukaran,
tantangan dan air mata”

“Sukses besar di hari depan,
Dimulai dari hal-hal kecil pada hari ini”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putera dan Roh-Kudus, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari bantuan dan dukungan doa dari berbagai Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus, karena atas izin dan berkat dari-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Bernadus Djawa dan Ibu Maria Mesa, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat dan nasihat kepada saya. Terima kasih untuk tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat. Semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bangga dengan hasil yang sudah saya kerjakan ini.
3. Keluarga tersayang (*Djawa Family*), yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat untuk saya. Untuk kakak Kletus Pua, yang selalu memberikan motivasi, ikut berjuang dan mendoakan walaupun dari jauh. Terima kasih untuk semua dukungannya, semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Hari Saptaning Tyas. Terima kasih telah memberikan banyak ilmunya kepada saya. Dengan segala Kemampuan dan kebaikan hati Ibu telah sabar membimbing, mengarahkan dan mengajarkan saya. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan hidup.
5. Pemerintah Kelurahan Towak. Terima kasih atas semua dukungan semangat dan doa selama mengerjakan skripsi ini.
6. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “GOVERNING PEMERINTAH MENGATASI ANCAMAN KRISIS PANGAN DI KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materil dari berbagai Pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan baik dan sabar dalam membimbing, mengarahkan serta mengajarkan penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staff dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta

6. Aparatur Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
7. Masyarakat Kelurahan Towak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga dapat membantu peneliti dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.
8. Bapak dan Ibu *kost Olivia*, Bapak Elias Nuwa dan Ibu Olivia, yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi untuk saya.
9. Teman-teman kost Olivia; Nardo, Artos, Albin, Nando, dan kraeng Carlos. Terima kasih sudah berjuang bersama selama menempuh pendidikan di Jogja.
10. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2018 khususnya kelas IP1B
11. Persiana Nofrianti, Figo, Lerry, Ell, Putri Ayu, Putri Dian, Via, Aminah dan sahabat lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan masukan selama mengerjakan skripsi ini.
12. Serta semua Pihak yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata ijinkan penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan penulis selama proses perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.

Nagekeo, 17 Maret 2022
Penulis

Fabianus Jawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Konseptual.....	8
1. Governing	8
2. Krisis Pangan	10
3. Governing Pemerintah Mengatasi Ancaman Krisis Pangan.....	12
4. Konsep Lurah dan Pemerintah Kelurahan	13

G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Unit Analisis	16
a. Lokasi Penelitian.....	16
b. Obyek Penelitian.....	16
c. Subyek Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
 BAB II PROFIL KELURAHAN TOWAK	 23
A. Geografis	23
B. Demografi	24
C. Sosial Ekonomi	28
D. Aparatur Kelurahan.....	32
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
A. Governing Pemerintah Dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Di Kelurahan Towak.....	40
B. Hambatan Dalam Implementasi Governing Pemerintah Menghadapi Ancaman Krisis Pangan di Kelurahan Towak	60
C. Dampak Governing Pemerintah Dalam Mengatasi Ancaman Krisis Pangan Pada Petani dan Masyarakat Kelurahan Towak	66
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Deskripsi Informan/subyek Penelitian.....	18
Tabel 1.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	25
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan	28
Tabel 2.6. Kepemilikan Lahan Pertanian.....	30
Tabel 2.7. Produksi Pangan Kelurahan Towak Tahun 2021	31
Tabel 2.8. Jenis Populasi Ternak	32
Tabel 2.9. Lurah dan Aparat Kelurahan Towak	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Teknik Analisis Data.....	22
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kelurahan Towak.....	34
Gambar 3.1. Optimalisasi Lahan Pekarangan Rumah	44
Gambar 3.2. Penyerahan Profil Tank dari Lurah Towak ke Masyarakat	47

INTISARI

Munculnya pandemic covid-19 pada awal tahun 2020 lalu mengakibatkan berbagai permasalahan diantaranya terganggunya produksi, distribusi dan konsumsi kebutuhan pokok akibat diberlakukannya PPKM dan larangan perjalanan bagi masyarakat. Kondisi ini dapat memicu kekhawatiran kelurahan Towak akan mengalami krisis pangan. Penelitian ini mengkaji terkait Governing Pemerintah (Lurah Towak) dalam Menghadapi Ancaman krisis Pangan di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini berangkat dari adanya keluhan dan kegelisahan masyarakat Kelurahan Towak akan ketahanan pangan di kelurahan Towak. Dalam membahas masalah ini peneliti menggunakan prespektif governing.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya adalah studi kasus kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan metode pengumpulan datanya yaitu data Primer melalui observasi, diskusi mendalam, dan wawancara serta data sekunder melalui dokumentasi tertulis, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data primer.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dilihat bahwa *governing* pemerintah dalam hal ini lurah Towak dalam menghadapi ancaman krisis pangan di Kelurahan Towak cukup tepat dan memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan antusias masyarakat Kelurahan Towak yang melaksanakan program-program tersebut dan berhasil menaikkan produktivitas pertanian di kelurahan Towak. Beberapa perbuatan pemerintah (*governing*) dalam menghadapi ancaman Krisis pangan di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu; optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami bahan-bahan pangan, bantuan profil tank/wadah penampung air kapasitas 1100 liter sebanyak 5 buah di Setiap RT di Kelurahan Towak, peningkatan jalan-jalan produksi pertanian, pengadaan sumur bor untuk masyarakat lingkungan III Mboaloing, kerja sama dengan Pihak swasta yaitu yayasan Plan Indonesia untuk memberikan penyuluhan, Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani di Kelurahan Towak serta yang terakhir kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo untuk memberikan bantuan benih jagung, padi, kacang, dan bahan pangan lainnya serta mendatangkan alat bantu produksi pertanian seperti *hand tractor*.

Untuk hambatan dalam implementasi *governing* pemerintah ini adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan dari menunggu penetapan APBD perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2021, Budaya konsumtif masyarakat, perubahan iklim global serta hewan ternak yang tidak ditertibkan.

Kata Kunci : Krisis Pangan, Governing atau Perbuatan Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia sejak bulan maret 2020 telah mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional, tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia.

Ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang penting pada saat pandemi *covid-19* karena dapat mengakibatkan berbagai permasalahan diantaranya terganggunya produksi, distribusi dan konsumsi kebutuhan pokok akibat diberlakukannya PPKM dan larangan perjalanan bagi masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Kondisi ini dapat memicu kekhawatiran jika Indonesia akan mengalami krisis pangan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi *covid-19*.

Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktifitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata adalah ketika kebanyakan restoran/kafe ditutup sementara, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya bahan pangan yang sudah di produksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyak UMKM akhirnya gulung tikar

ditengah situasi pandemi serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan dimana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun.

Permasalahan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan. Dengan adanya pembatasan-pembatasan dan penutupan sementara pasar-pasar kelurahan maupun pasar kecamatan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih.

Penutupan sementara pasar kecamatan Aesesa oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, mengakibatkan pendistribusian bahan pangan dari daerah/wilayah kecamatan lain menjadi terhambat. Bahan-bahan pangan yang ada di kecamatan lain tidak bisa masuk ke wilayah Kecamatan Aesesa. Hal ini membuat masyarakat di Kelurahan Towak merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pangan yang bisa di konsumsi, dikarenakan di Kelurahan Towak sendiri tidak memiliki pasar kelurahan. Semua bahan pangan diperoleh hanya dari pasar Kecamatan Aesesa yang letaknya sekitar 7 km dari Kelurahan Towak.

Petani selaku kunci dari pangan Indonesia selama masa pandemi ini juga diharapkan dapat tetap sehat dan bekerja dengan maksimal. Permasalahannya adalah sekarang ini jumlah petani di Indonesia banyak yang tergolong masuk ke usia tua, minim sekali jumlah petani yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan, seperti yang terjadi di Kelurahan Towak sendiri, para petani banyak yang telah berusia tua yang tidak kuat lagi untuk bekerja, sedangkan petani dari kalangan milenial sangat sedikit. Sebagian kalangan milenial hanya menganggur saja dan tidak memiliki pekerjaan apa-apa, hal ini membuat produktivitas pangan di Kelurahan Towak menurun.

Masalah lain yang ada di kelurahan Towak yaitu banyak lahan tidur atau lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara baik untuk ditanami bahan-bahan pangan seperti padi, jagung, kacang dan lain sebagainya. Lahan-lahan pertanian yang luas dibiarkan begitu saja, kemudian kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah untuk ditanami bahan pangan masih sangat rendah. Pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang menunjang ketahanan pangan juga masih sangat rendah. Para petani di Kelurahan Towak masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mengolah lahan pertanian mereka.

Krisis pangan di Kelurahan Towak juga terjadi akibat kurangnya penyuluhan/pendampingan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan lahan pertanian untuk ditanami bahan pangan, kemudian kekurangan bibit/benih pun menjadi masalah yang sering di alami petani di Kelurahan Towak, contohnya seperti saat ini disaat angka kasus pandemi covid-19 di Kelurahan Towak menurun, masyarakat mulai melakukan aktifitas pertanian seperti biasanya tetapi bibit/benih tidak ada untuk ditanam.

Untuk mengatasi hal ini, lurah harus mengambil langkah/strategi yang tepat dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Dimulai dari menyejahterakan petani melalui bantuan dan fasilitas seperti misalnya bantuan relaksasi kredit kepada para petani miskin, para petani juga sebaiknya dikenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mengolah dan mendistribusikan serta menjaga kestabilan harga produk pangan dimasa pandemi seperti ini, para petani agar diberi fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran melalui program BUMITANI (Badan Usaha Milik Petani), para petani juga harus diberi penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah dan dinas-dinas terkait di kabupaten, khususnya petani milenial untuk menambah wawasan dan semangat kerja, sehingga akan berpengaruh pada produktifitas pangan. Lumbung

pangan di tiap lingkungan harus dihidupkan kembali untuk membangun ketahanan pangan, salah satu upaya untuk menghidupkan lumbung pangan di setiap lingkungan yaitu dengan mewajibkan seluruh masyarakat di setiap lingkungan/ dusun untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami bahan pangan/ *urban farming*. Selain itu, lurah Towak juga perlu untuk memetakan potensi-potensi pertanian yang ada, mendorong pemanfaatan lahan tidur yang masih sangat luas, melakukan stabilisasi harga pangan, dan juga membuat program-program yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti mengenai *Governing* atau perbuatan pemerintah. Perbuatan apa yang harus dilakukan oleh Lurah Towak dalam mengatasi ancaman krisis pangan. Adapun tujuan dari penelitian ini dan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di kelurahan Towak yaitu karena peneliti ingin mengetahui apa perbuatan Lurah Towak untuk mengatasi ancaman krisis pangan ini, sebab Kelurahan Towak merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Nagekeo yang paling merasakan ancaman krisis pangan.

Di kelurahan Towak produksi bahan pangan misalnya tanaman padi, palawija dan hortikultura menurun -3.25 % selama 3 tahun terakhir ini dan menurun drastis sejak adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 lalu. (*Sumber:Data Pertanian Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa*)

Untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini, Lurah Towak sudah membuat beberapa program kegiatan yaitu: *pertama*, Lurah Towak mewajibkan semua Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kelurahan Towak untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka untuk ditanami bahan-bahan pangan dan semua RT di Kelurahan Towak diwajibkan harus mempunyai satu kebun RT, *kedua*, Lurah Towak melalui Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) telah menyumbangkan 5 (lima) buah

profil tank atau bak penampung air di masing-masing RT yang ada di Kelurahan Towak dengan tujuan untuk menampung air yang akan digunakan untuk menyiram tanaman pangan, *ketiga*, Lurah Towak juga telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo untuk mendatangkan bibit/benih jagung dan memberikan benih tersebut secara gratis ke seluruh masyarakat Kelurahan Towak untuk ditanam, kemudian program yang ke *empat* adalah Lurah Towak bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini Yayasan Plan Indonesia untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani mengenai cara pemanfaatan lahan pekarangan menggunakan teknologi irigasi tetes atau RO DRIP dan telah menyumbangkan beberapa alat pertanian untuk membantu produktivitas pangan masyarakat, serta program yang *kelima* adalah Lurah Towak bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo telah mendatangkan alat-alat pertanian seperti *hand tractor* dan alat bajak ladang untuk membantu masyarakat menghidupkan kembali lahan-lahan pertanian yang selama ini tidak dimanfaatkan.

Program-program ini disambut baik oleh masyarakat dan sudah dijalankan tetapi belum optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan, seperti program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk ditanami bahan pangan belum dilakukan secara baik dikarenakan masih terdapat hewan peliharaan seperti kambing dan sapi yang dibiarkan begitu saja dan merusak tanaman, kemudian di beberapa RT mengalami kekurangan air untuk menyiram tanaman pangan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal diatas, dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan salah satu dari 5 prespektif/mazhab Timoho yaitu GOVERNING. Mengapa peneliti menggunakan prespektif ini? karena peneliti ingin melihat masalah ini dari sudut pandang governing, seperti apa perbuatan pemerintah dalam hal ini Lurah Towak untuk mengatasi ancaman krisis pangan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan pentingnya penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang dilakukan oleh Lurah Towak dalam menghadapi ancaman krisis pangan?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan governing/perbuatan pemerintah ini?
3. Apa dampak dari governing pemerintah (Lurah Towak) dalam mengatasi krisis pangan pada petani dan masyarakat Kelurahan Towak?

C. FOKUS PENELITIAN

Fokus yang ditetapkan pada penelitian di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebagai berikut:

1. Governing pemerintah (Lurah Towak) dalam pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang sudah lama tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Governing pemerintah (Lurah Towak) dalam pemberdayaan petani melalui dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK)
3. Governing pemerintah (Lurah Towak) dalam bekerja sama dengan pihak swasta dan dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo
4. Hambatan dalam implementasi governing pemerintah.
5. Dampak dari governing pemerintah (Lurah Towak) dalam mengatasi krisis pangan pada petani dan masyarakat Kelurahan Towak.

D. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan penelitian yang ingin dicapai, yang dimaksud untuk memberikan arah kepada Setiap peneliti dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perbuatan pemerintah/governing yang diambil oleh Lurah Towak dalam menghadapi ancaman krisis pangan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan governing pemerintah (Lurah Towak).
- 3) Untuk mengetahui dampak dari governing pemerintah (Lurah Towak) dalam mengatasi krisis pangan pada petani dan masyarakat kelurahan Towak.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari suatu penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang lain yang membacanya. Dengan demikian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan pada khususnya, dan sebagai pembelajaran bagi peneliti dan menganalisis masalah secara ilmiah. Mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dalam proses mewujudkan governing pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis pangan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang positif di sektor pertanian pada khususnya masalah krisis pangan, dan sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini. Memberikan gambaran tentang governing pemerintah (Lurah Towak) dalam menghadapi krisis pangan di Kelurahan Towak.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan penelitian yang membingkai kerangka pikir penelitian ini. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka. Melalui pemaparan tersebut, penulis akan memfokuskan pada ketahanan pangan dan Strategi-strategi Lurah Towak. Setelah memaparkan konsepsi teori, langkah berikutnya ialah penulis menyusun kerangka pikir penelitian.

1. Governing

Perbuatan pemerintah disebut governing (G2). Governing adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep ruling, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Literatur pembeda ditulis oleh Steven A. Cook (2007) “ruling but not governing” (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (governing).

Dalam hal ini ruling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara ruling dengan governing berbeda, di mana ruling sendiri bisa dilakukan. Konsep governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. Governing mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam governing. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

1	Makna	Perbuatan dan aktivitas memerintah. Ada yang pakai konsep menata (ordering)
2	Posisi epistemologis	G2 memperluas obyek kajian ilmu pemerintahan. G2 umumnya bicara tentang “predikat” yang menysar pada “obyek” luas (air, hutan, petani, beras, kemiskinan, pembangunan, dll). P-O itu bisa didekati dengan institusi G1, G4, & G5
3	Tema makro	G2 the commons, G2 the poor, G2 the roads, G2 economy, G3 development
4	Konsep meso-mikro	Reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi, dll
5	Sebagai objek	Bentuk perbuatan pemerintah dijelaskan dengan sosiologi, institusionalisme, contentious politics, kekuasaan elite, governance, governmentality
6	Sebagai prespektif	Belum berdiri sendiri sebagai perspektif untuk interpretasi dan eksplanasi
7	Metode	Rasionalisme, Konstruktivisme, Kontekstualisme
8	Arah dan ilustrasi studi	Misal: studi tentang pemerintah memerintah dana desa; memerintah kaum miskin, memerintah desa, memerintah hutan, dll. Ini bisa didekati dengan ilmu sosial, maupun institusionalisme, governance, dan belakangan sangat membanjir studi dengan Governmentality.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu governing adalah perbuatan atau aktivitas memerintah oleh pemerintah yang mempunyai otoritas dan menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Dalam melakukan aktifitasnya untuk mewujudkan tujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah melakukan dua macam tindakan atau perbuatan yaitu tindakan biasa atau nyata (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan/perbuatan-perbuatan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban.

2. Krisis Pangan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997) krisis adalah “keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram dalam berbagai hal seperti ekonomi dan moral”. Selanjutnya (Chaplin, ibid:118) menyebutkan juga bahwa krisis adalah “satu keputusan yang besar dan sangat penting bagi seseorang”. Menurut (Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Dari dua pengertian di atas maka kita bisa mengambil kesimpulan krisis pangan adalah keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram

dalam segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa pengertian krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain; kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diartikan bahwa pangan merupakan kebutuhan terpenting bagi masyarakat, maka dari itu pemerintah melakukan kesiapsiagaan dalam krisis pangan. Kesiapsiagaan tersebut ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah, berbentuk program kesiapsiagaan krisis pangan nasional, ditingkat Provinsi ditetapkan Gubernur dengan program kesiapsiagaan krisis pangan Provinsi, dan Bupati atau Wali kota, untuk program kesiapsiagaan krisis pangan kabupaten atau kota.

Untuk menilai bahwa suatu daerah atau sebagian wilayah di Indonesia mengalami krisis pangan adalah berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, yang pada intinya menyatakan bahwa kriteria krisis pangan adalah sebagai berikut:

1. Penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
2. Lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

3. Governing/Perbuatan Pemerintah Mengatasi Ancaman Krisis Pangan

Pandemi covid-19 yang dengan skala besar mengubah pola hidup dan berbagai sendi kehidupan masyarakat, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi krisis pangan menjadi suatu keharusan. Kesiapsiagaan tersebut perlu disiapkan jauh sebelum suatu bencana datang, agar pada saat kedaruratan krisis pangan tersebut terjadi, semua Pihak sudah siaga untuk menghadapinya sehingga korban jiwa dapat diminimalkan dan sistem pangan tetap dapat berfungsi baik untuk memenuhi kebutuhan pangan guna mempertahankan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengeluarkan suatu Peraturan Daerah untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di NTT. Gubernur NTT mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan daerah ini dibuat dengan alasan karena makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi, lahan pertanian pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian, degradasi dan fragmentasi lahan pertanian, sehingga dikhawatirkan pemerintah provinsi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi NTT ini, Bupati Kabupaten Nagekeo, akhirnya membuat beberapa program kegiatan untuk menghadapi krisis pangan di Kabupaten Nagekeo. Bupati Nagekeo mewajibkan seluruh camat dan Lurah di Kabupaten Nagekeo untuk memanfaatkan kembali lahan-lahan pertanian yang sudah lama tidak dimanfaatkan, kemudian

mencanangkan program *urban farming* di Setiap desa/kelurahan, pemberian bantuan alat-alat produksi pertanian, pembentukan badan-badan usaha tani, pemberian bantuan modal usaha tani, memberikan Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada petani, melakukan stabilisasi harga pangan serta beberapa program lain yang berkaitan dengan krisis pangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Nagekeo sampai pada tingkat kelurahan Towak dalam hal ini Lurah Towak telah membuat beberapa program kegiatan yang dianggap tepat untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini. Dengan adanya program-program ini diharapkan dapat memberikan hasil atau dampak yang baik kepada masyarakat kabupaten Nagekeo pada umumnya dan masyarakat Kelurahan Towak pada khususnya sehingga krisis pangan yang terjadi bisa segera diatasi.

4. Konsep Lurah dan Pemerintah Kelurahan

Sampai saat ini keterlibatan tentang aparatur pemerintah masih dianggap penting dan menentukan, karena aparatur pemerintah juga dianggap merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran aparatur pemerintah yang dianggap menentukan adalah peran Lurah itu sendiri. Sebab Lurah adalah merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka dibentuklah kelurahan. Kelurahan merupakan unit terkecil dalam pemerintah Negara Republik Indonesia (Suryasubrata, 2001). Terbentuknya suatu kelurahan harus memperhatikan syarat-syarat luas wilayah,

jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri dalam Negeri (A.W. Wijaya, 2004).

Dalam pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan, langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintahan umum, termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Kelurahan (Lurah) adalah penyelenggara/penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Bayu Suryaningrat, 2001). Seorang Lurah pada dasarnya dilarang melakukan tindakan/kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merupakan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat di Kelurahan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (A.W. Wijaya, 2004).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi diatas, lurah dibantu perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Tugas lurah meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
4. Pemelihara ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, maka penelitian ini dikategorikan kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai metode kajiannya. Studi kasus dipilih sebagai metode kajian, karena memiliki kelebihan yang mendalam dalam rangka menjelaskan suatu topik atau fenomena. Selain itu metode studi kasus juga memiliki keunggulan, karena pengungkapan atau pemaparan dilakukan secara komprehensif, sehingga menghasilkan pengetahuan (teori) yang relevan. Ringkasnya penelitian dengan metode studi kasus berupaya mengungkap kompleksitas masalah untuk membangun suatu kerangka pikir (pengetahuan) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kelompok diskusi mendalam dan observasi (Bnd.Stake,2005;Yin,1986; Creswell,2007).

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Studi kasus merupakan

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga dalam hal ini peneliti lakukan di Kelurahan Towak. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan baik melalui wawancara, observasi, partisipasi atau dokumentasi.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang masalah, Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa merupakan tempat untuk penelitian ini, baik secara teoritis dan praktis. Adapun durasi penelitian selama satu bulan, yakni: bulan Januari 2022 sampai selesai.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah perbuatan-perbuatan pemerintah/Governing Lurah Towak Dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan di Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami bahan-bahan pangan,
2. bantuan profil tank/wadah penampung air kapasitas 1100 liter sebanyak 5 buah di Setiap RT di Kelurahan Towak,
3. peningkatan jalan-jalan produksi pertanian,
4. pengadaan sumur bor untuk masyarakat lingkungan III Mboaloing,

5. kerja sama dengan Pihak swasta yaitu yayasan Plan Indonesia untuk memberikan penyuluhan, Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani di Kelurahan Towak serta,
6. kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo untuk memberikan bantuan benih jagung, padi, kacang, dan bahan pangan lainnya serta mendatangkan alat bantu produksi pertanian seperti *hand tractor*.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Dalam penentuan informan/narasumber peneliti mengambil informan secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri informan yang dianggap mampu memberikan data-data penelitian yang akurat, valid dan dapat dipercaya sesuai dengan Governing Pemerintah Dalam Menghadapi Ancaman Krisis Pangan di Kelurahan Towak.

Berikut informan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini:

1. Lurah Towak
2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana.
4. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
5. Kepala Lingkungan I Wewoloe
6. Kepala Lingkungan II Dheru
7. Kepala Lingkungan III Mboaloing
8. Para Petani
9. Tokoh Masyarakat.

Subjek penelitian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Deskripsi Informan/Deskripsi Subyek Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Pekerjaan
1.	Benediktus K. Rani, S.Hut	Laki-laki	38 Tahun	S-1	Lurah	PNS
2.	Rasminto Malissa	Laki-laki	28 Tahun	S-1	Kasi Pemerintahan	PNS
3.	Maria Florida Ebu	Perempuan	47 Tahun	D-III	Kasi Pemberdayaan, Sarana& Prasaran	PNS
4.	Venansius Tibo	Laki-laki	59 Tahun	SMA	LKMK	-
5.	Siprianus Separ	Laki-laki	65 Tahun	SMP	Kaling I	-
6.	Yonas Lodhang	Laki-laki	60 Tahun	SMP	Kaling II	-
7.	Petrus Dhema	Laki-laki	50 Tahun	SMA	Kaling III	-
8.	Marselinus Nagi	Laki-laki	40 Tahun	D-III	-	Tokoh masyarakat

9.	Bernabas Marang	Laki-laki	79 Tahun	SD	-	Tokoh masyarakat
10.	Bernadus Djawa	Laki-laki	77 Tahun	SD	-	Tokoh Masyarakat
11.	Kanisius Tola	Laki-laki	50 Tahun	SMP	-	Petani
12.	Baltasar Rala	Laki-laki	60 Tahun	SMP	-	Petani
13.	Gerardus Goa	Laki-laki	37 Tahun	SMA	-	Petani
14.	Theofilus Rimba	Laki-laki	27 Tahun	D- III	-	Petani
15.	Fransiskus Djo	Laki-laki	27 Tahun	SMA	-	Petani
16.	Anastasia Wona	Perempuan	55 Tahun	SMA	-	Petani

Sumber: Data Primer Penelitian, 2022

Berdasarkan data dari tabel deskripsi informan diatas, yang dijadikan sebagai subyek penelitian dalam penelitian ini dari Pemerintah Kelurahan Towak dengan 3 (tiga) informan yaitu Lurah Towak, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan prasarana; subyek penelitian ini juga dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan 4 (empat) informan yaitu Ketua LKMK, Kaling I, Kaling II, dan Kaling III, kemudian dari tokoh masyarakat dengan 3 (tiga) informan serta yang terakhir dari para petani dengan 6 (enam) informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kajian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, diskusi mendalam dan observasi.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis atau audio, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data primer.

Tabel. 1.2. Teknik Pengumpulan data

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan Lapangan	Hasil Wawancara <ol style="list-style-type: none">1. Lurah Towak.2. Kasi Pemerintahan3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, sarana & prasaran4. Para petani5. Tokoh Masyarakat6. Pengamatan Lapangan	Wawancara mendalam dan observasi
Data Sekunder	Dokumentasi tertulis	<ol style="list-style-type: none">1. Data profil dan demografi Kelurahan Towak.2. Data keadaan pangan kelurahan Towak	Teknik dokumentasi

	Dokumen audio visual	1. Foto-foto 2. Rekaman wawancara	Teknik bahan audio visual
--	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengotensisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka tetapi bersifat subjektif dan deskriptif.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksi dan informasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

b. Tahap penyajian data

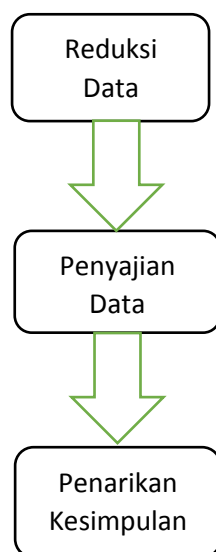
Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam terhadap masyarakat di kumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif.

c. Tahap penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223).

Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

Gambar 1.1. Teknik Analisa Data



BAB II

PROFIL KELURAHAN TOWAK KECAMATAN AESESA

KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

A. GEOGRAFIS

Kelurahan Towak merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelurahan Towak memiliki wilayah seluas 8.825 Ha.

1. Batas Wilayah

Batas Wilayah Kelurahan Towak adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Nggolonio, Desa Waekokak, dan Kelurahan Mbay II

Selatan : Desa Tedakisa dan Kelurahan Dhawe

Timur : Kelurahan Mbay I dan Kelurahan Mbay II

Barat : Desa Tendamude dan Desa Lengkosambi

2. Pembagian wilayah administrasi

Wilayah kelurahan Towak dibagi menjadi 3 lingkungan/dusun dan 12 RT, diantaranya:

- a. Lingkungan/dusun 1 Wewoloe
- b. Lingkungan/dusun II Dheru
- c. Lingkungan/dusun III Mboaloing

B. DEMOGRAFI

Kondisi demografi suatu wilayah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu manusia merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan, yang artinya disini manusia sebagai pelaksana sekaligus sasaran dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk warga Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan sejumlah 1.511 jiwa yang terdiri dari 309 Kepala Keluarga.

Jumlah laki-laki : 700 orang

Jumlah perempuan : 811 orang

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Keterangan	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-Laki	700	46,32
2.	Perempuan	811	53,67
	Jumlah	1511	100 %

Sumber: Profil Kelurahan Towak Tahun 2020

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa jumlah penduduk Kelurahan Towak yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 46,32% lebih sedikit atau kurang dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 53,67 %. Jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Towak sebanyak 1511 orang.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Nomor	Keterangan	Jumlah	Persentase %
1.	0-15 Tahun	378	25,01
2.	16-55 Tahun	931	61,61
3.	Diatas 55 Tahun	202	13,36
4.	Jumlah	1511	100 %

Sumber: Profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Berdasarkan data sebelumnya dapat dianalisis bahwa penduduk yang berusia 16 s/d 55 tahun lebih banyak atau dominan yaitu dengan jumlah 931 jiwa dengan persentase 61,61 % dari jumlah penduduk yang berusia diatas 55 tahun yaitu dengan jumlah 202 jiwa dengan persentase 13,36 % dan penduduk berusia 0 s/d 15 tahun dengan jumlah 378 jiwa dengan persentase 25,01 %.

Keadaan penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Towak dihitung dari angka bayi sampai lanjut usia. Keadaan usia penduduk di Kelurahan Towak masih sangat potensial untuk mengembangkan suatu usaha yang maksimal karena masih banyak didominasi oleh penduduk yang berusia produktif, sehingga pola pikir untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian bisa dilaksanakan secara maksimal demi mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Towak.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	Tamat SD/ sederajat	447	40,56

2.	Tamat SMP/ sederajat	250	22,68
3.	Tamat SMA/ sederajat	307	27,85
4.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
5.	Tamat D-2/ sederajat	-	-
6.	Tamat D-3/ sederajat	52	4,71
7.	Tamat S-1/ sederajat	44	3,99
8.	Tamat S-2/ sederajat	2	0,18
9.	Tamat S-3/ sederajat	-	-
	Jumlah	1.102	100 %

Sumber: Profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kesadaran kritis masyarakat akan meningkat sehingga akan membantu program pemerintah Kelurahan dalam mengatasi ancaman krisis pangan.

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan SD/ sederajat lebih banyak atau dominan yaitu 40,56% dari Tingkat pendidikan yang lainnya. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa pendidikan yang ada di Kelurahan Towak relatif normal, dimana pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA jumlahnya tidak terlalu jauh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah Kelurahan Towak untuk meningkatkan mutu kualitas SDM yang berkualitas dan berkarakter sejak dini.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Nomor	Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1.	Petani	280	18,53
2.	PNS	22	1,45
3.	Pengrajin industry rumah tangga	30	1,98
4.	Peternak	25	1,65
5.	Bidan Swasta	1	0,06
6.	Honoror/THL	3	0,19
7.	Jumlah	361	23,86

Sumber: Profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Berdasarkan data sebelumnya diatas dapat dianalisis bahwa mata pencaharian atau pekerjaan yang paling banyak diminati masyarakat Kelurahan Towak adalah sebagai petani sebanyak 280 orang (18,53%), kemudian diikuti oleh pengrajin industry rumah tangga sebanyak 30 orang (1,98%). Sedangkan pekerjaan yang paling sedikit diminati adalah bidan swasta yaitu 1 orang (0,06%) dan honoror/THL yaitu 3 orang (0,19%). Berdasarkan tabel 2.4. dapat dikatakan bahwa di Kelurahan Towak terdapat mata pencaharian yang beragam. Namun demikian pemerintah kelurahan perlu melakukan inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang menampung tenaga kerja dari masyarakat setempat agar dapat mencukupi kebutuhan mereka dikarenakan banyak masyarakat Kelurahan Towak yang menganggur.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan

Nomor	Agama	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	4	0,26
2.	Kristen	4	0,26
3.	Katholik	1.503	99,47
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-
7.	Aliran kepercayaan	-	-
8.	Jumlah	1511	100%

Sumber: *Profil Kelurahan Towak Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa warga masyarakat Kelurahan Towak mayoritas menganut agama Katholik dengan jumlah 1.503 (99,47%) kemudian diikuti oleh agama Islam dan agama Kristen masing-masing sejumlah 4 orang (0,26%). Meskipun mayoritas penduduk Kelurahan Towak beragama Katolik tetapi tingkat toleransi antar umat beragama sangat tinggi, misalnya pada perayaan atau hari raya umat agama Katolik seperti hari raya Natal dan Paskah maka yang menjaga keamanan gereja adalah kelompok-kelompok muda muslim, begitupun sebaliknya. Selain menjaga keamanan, gotong royong antar agama dalam pembangunan tempat ibadahpun sangat tinggi.

C. SOSIAL EKONOMI

Tatanan kehidupan masyarakat Kelurahan Towak yaitu sangat kental dengan sikap solidaritas sesama dan kegiatan sosial kemasyarakatan sangat terpelihara.

Terdapat kegiatan sosial seperti gotong royong. Sedangkan keadaan ekonomi, hampir keseluruhan dari masyarakat kelurahan Towak berstatus menengah kebawah. Masyarakat Kelurahan Towak pada umumnya sebagian besar berprofesi dalam bidang pertanian, perkebunan dan sebagai peternak. Kelurahan Towak merupakan kelurahan yang sedang berkembang dan masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif atau ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh. Jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha lainnya. Potensi perekonomian yang berkembang di wilayah Kelurahan Towak adalah bergerak di bidang Pertanian dan perkebunan serta peternakan.

a. Pertanian dan perkebunan

Penyokong ekonomi utama di Kelurahan Towak adalah produk hasil pertanian, terutama produk tanaman pangan. Selain produk tanaman pangan, hasil pertanian lainnya adalah hortikultura dan tanaman lahan kering. Namun hal tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan pertanian di Kelurahan Towak selama ini, antara lain:

- Jalan usaha tani sebagian berupa jalan tanah dan jalan setapak
- Sarana budidaya dan komoditas belum optimal
- Hewan peliharaan yang tidak dijaga secara baik menjadi hama pengrusak tanaman
- Kekurangan bibit/benih tanaman pangan
- Lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat
- Pengolahan lahan masih menggunakan peralatan tradisional dan lain sebagainya.

Beberapa permasalahan seperti yang disebutkan diatas mengakibatkan produktifitas pangan di Kelurahan Towak semakin menurun setiap tahunnya, terlebih sejak adanya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 lalu. Berikut tabel data kepemilikan lahan pertanian dan produksi pertanian di Kelurahan Towak:

Tabel 2.6. Kepemilikan Lahan Pertanian

Nomor	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keluarga yang memiliki Lahan (KK)
1.	Tanaman Pangan	265	265
2.	Tanaman Buah-buahan	50	100
3.	Tanaman Perkebunan	200	265

Sumber : profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Towak yang memiliki Lahan Pangan cukup banyak yaitu sebanyak 265 KK dengan luas lahannya yaitu 265 Ha.

Lahan yang luas ini jika dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat maka masalah krisis pangan di Kelurahan Towak bisa segera diatasi, karena kelurahan Towak memiliki potensi pertanian yang sangat bagus.

Tabel 2.7. Produksi Pangan Kelurahan Towak Tahun 2021

Nomor	Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)	Nilai Produksi (Rp)
1.	Padi Sawah	-	-	-
2.	Jagung	200	1	100.000.000
3.	Sayur- Sayuran	30	-	20.000.000
4.	Buah-Buahan	35	3	15.000.000

Sumber: profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis bahwa produktifitas bahan pangan di Kelurahan Towak masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan potensi lahan pertanian yang ada. Misalnya seperti komoditas jagung, dengan luas lahan sebesar 200 Ha, hasil panen yang diperoleh hanya 1 Ton/Ha. Ini berarti produktifitasnya sangat rendah. Untuk itu, perlu adanya program/strategi yang tepat dari pemerintah Kelurahan Towak untuk bisa menaikan produktifitas bahan pangan di Kelurahan Towak.

b. Peternakan

Seperti di Kelurahan lainnya, mempunyai hewan ternak dianggap sebagai tabungan dan belum menjadi usaha utama. Setiap lingkungan/dusun di Kelurahan Towak, seperti lingkungan I Wewoloe, Lingkungan II Dheru dan Lingkungan III Mboaloing hampir semua Kepala Keluarga mempunyai hewan ternak.

Dengan kisaran jumlah hewan ternak: untuk sapi antara 3 ekor sampai 5 ekor Setiap Kepala Keluarga, untuk kambing 5 ekor sampai 10 ekor Setiap

Kepala Keluarga. Selain itu ada jenis ternak lainnya, jenis ternak yang dipelihara biasanya adalah:

Tabel 2.8. Jenis Populasi Ternak

Nomor	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (ekor)
1.	Sapi	50	500
2.	Kerbau	5	10
3.	Babi	275	-
4.	Ayam Kampung	275	2500
5.	Bebek	10	50
6.	Kambing	75	1000
7.	Ayam Broiler	-	-

Sumber : Profil Kelurahan Towak Tahun 2021

Dengan menjadikan hewan ternak sebagai tabungan di masa depan oleh masyarakat Kelurahan Towak, hal tersebut menunjukkan semangat untuk memiliki hewan cukup tinggi hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.6 diatas dimana hampir secara keseluruhan Kepala Keluarga memiliki ternak. Berdasarkan tabel tersebut, jenis ternak ayam kampung (2500 ekor) dan kambing (1000 ekor) menjadi hewan yang lebih banyak dipelihara sedangkan jenis ternak kerbau sangat sedikit jumlahnya yaitu 10 ekor.

D. APARATUR KELURAHAN

1. Pembagian Wilayah Kelurahan

Kelurahan Towak terbagi menjadi 3 Lingkungan/dusun dan 12 RT.

RT 01 sampai RT 04 berada di wilayah lingkungan I Wewoloe, RT 05 sampai RT 08 berada di wilayah lingkungan II Dheru dan RT 09 sampai RT 012 berada di wilayah lingkungan III Mboaloing.

2. Aparatur Kelurahan

Kelurahan Towak dipimpin oleh seorang Lurah bernama Benediktus K. Rani, dan dibantu oleh 4 orang aparat kelurahan yaitu Sekretaris Lurah, Bendahara, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana.

Tabel 2.9. Lurah dan Aparat Kelurahan Towak

Nomor	Nama	Jabatan
1.	Benediktus K. Rani, S.Hut	Lurah
2.	Yohanes Roncali Taga Lea,A.Md	Sekretaris Lurah
3.	Rasminto Malisa, S.STP	Seksi Pemerintahan
4.	Rosdiana Pelita Lura	Bendahara
5.	Maria Florida Ebu, A.Md	Seksi Pemberdayaan, sarana & prasarana
6.	Siprianus Separ	Kepala Lingkungan I Wewoloe
7.	Yonas Lodhang	Kepala Lingkungan II Dheru
8.	Petrus Dhema	Kepala Lingkungan III Mboaloing

3. Struktur Organisasi

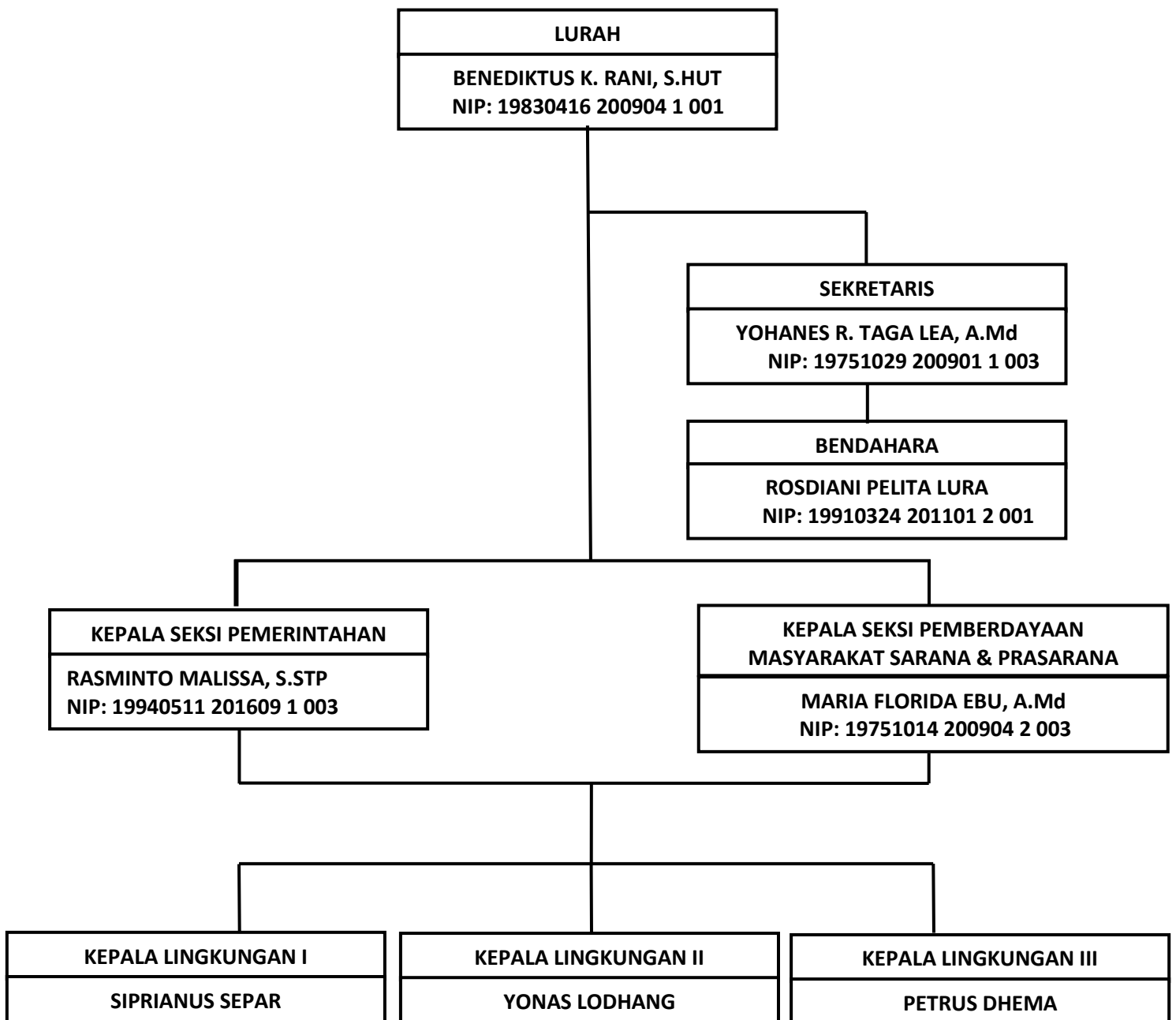
Susunan organisasi dan tata kerja Aparatur Kelurahan Towak adalah sebagai berikut:

- 1) Lurah
- 2) Sekretaris Lurah

- 3) Bendahara
- 4) Kepala Seksi Pemerintahan
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana
- 6) Kepala Lingkungan

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kelurahan Towak

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TOWAK



4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi diatas, lurah dibantu perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Berikut tugas pokok dan fungsi tata kerja Aparatur Kelurahan Towak:

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah fungsi dari lurah:

- Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
- Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- Pengelolaan urusan kesekretariatan.

b. Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan

keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Berikut adalah fungsi dari sekretaris:

- Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan kelurahan;
- Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran;
- Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kelurahan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan. Bendahara kelurahan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban.

Berikut rincian tugas-tugas bendahara antara lain:

- Membantu membuat perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan alokasi dana yang ditetapkan;
- Mengurus pencairan anggaran;

- Melaksanakan administrasi keuangan;
- Melaksanakan pembayaran transaksi keuangan;
- Menjamin atas keamanan penyimpanan uang;
- Membuat daftar perjalanan dinas (SPJ) dan kontrak;
- Membantu pelayanan konsumsi rapat dan lain-lain.
- Membuat laporan keuangan secara online;
- Membuat laporan keuangan bulanan kepada Sekretaris dan
- Bertanggung jawab kepada lurah untuk aspek keuangan

d. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat.

Berikut adalah fungsi dari seksi pemerintahan:

- Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan,
- Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data kependudukan;
- Pengumpulan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;

- Pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

- Membina dan mengarahkan, bawahan dalam pelaksanaan tugas;;
- Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
- Membina dan mengembangkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba atau penilaian Desa/ Kelurahan di tingkat kecamatan;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat;
- Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah / unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan;

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-book:

- Andhika. 2009. *Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Arikunto. 2006. *Metodologi Pertanian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Asmanto, Priadi, Ardi Adji, dan Sutikno. 2020. *Ringkasan kebijakan Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT. 2009. Laporan Tahunan.
- Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian. 2020. *Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidat Non Beras*. Road Map 2020-2024. Jakarta.

Jurnal:

- Aidha, Zuhrina. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Ketahanan Pangan Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Bilah Barat. *Tropicho*. 1 (1) : 22-29
- Ashari, Saptana, Purwantini, T.B. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 30 (1): 13-30.
- Fiandana, Yanuar. 2021. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. *Jurnal Administrasi Public*. 3 (10): 1792-1786
- Ginting, Ari Mulianta. 2012. Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 3 (1): 65-78
- Indrawati, Lina. 2021. Kesiapan Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bakti Parahita*. 2 (1): 82-90
- Mudrieqi, Sulfitri. 2014. Problematika Krisis Pangan Dunia Dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad*. 06 (02): 1287-1302
- Nur Rachman, Andi, dkk. 2021. Piloting Penanggulangan Krisis Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Optimalisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kelurahan Mugarsari dan Setiawargi Kota Tasikmalaya. *ATTEC*. 2 (1):36-43.
- Prabowo, Rossi. 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian*. 6 (2): 62-73
- Purnomo, Didit. 2012. Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Desa Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13 (2): 303-315
- Rachman, H. P. S. dan Mewa. A. 2008. Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Indonesia. *Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program : Analisis Kebijakan Pertanian*. 6 (2):140-154.

- Saroy, Tobias. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Program Pangan: *Jurnal Holistic*. 14 (1): 1-16
- Swardana, Ardli. 2020. Optimalisasi Lahan Pekarangan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Krisis Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jagros*. 4 (2): 246-258

Internet :

- Jayani, D.H. 2020. Krisis Pangan akibat COVID-19. <https://katadata.co.id/infografik/2020/05/07/krisis-pangan-akibat-covid-19>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Khudori. 2020. Perang Lawan Corona dan Benteng Terakhir Krisis Pangan. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503093852-93499500/perang-lawan-corona-dan-benteng-terakhir-krisis-pangan>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- 5 Jenis-jenis penelitian. <https://m.kapanlagi.com> .Diakses tanggal 05 Desember 2021
- <https://jurnal.apmd.ac.id> diakses tanggal 25 Novembr 2021
- <https://www.liputan6.com/news/read/4294599/hadapi-krisis-pangan-pemerintah-memiliki-upaya-khusus> diakses tanggal 1 Februari 2022
- <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91055> diakses tanggal 1 Februari 2022
- Suswono.2010. Strategi Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan.
<http://skripsi.2011.blogspot.com/2010/11/strategipengembangan.lajan.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2021

Skripsi :

- Ikhlas, Muhammad. 2020. Deteksi dan Analisis Strategi Pencegahan Kerentanan Pangan di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Iqbal, Muh. 2016. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Irawan, Hengki. 2018. Strategi Pemerintah Dalam Pemenuhan Ketahanan Pangan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Karmila. 2018. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Beras) di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Muh. Zulkarnain, 2017. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan